

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan pengemis di kota-kota besar Indonesia, termasuk di Kota Pekanbaru, menjadi fenomena sosial yang patut untuk dikaji lebih lanjut. Fenomena ini muncul sebagai akibat dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berhubungan. Pengemis seringkali dipandang sebagai kelompok marginal yang berada di luar sistem sosial yang ada, sehingga keberadaan mereka sering menjadi pertanyaan bagi masyarakat urban. Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau merupakan salah satu Kota besar di Pulau Sumatra yang terus berkembang pesat baik dari segi ekonomi, infrastruktur, maupun jumlah penduduk (Ikhsan, et.all., 2024). Namun, pesatnya urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak selalu diimbangi dengan pemerataan kesejahteraan menyebabkan jumlah pengemis di Kota Pekanbaru terus meningkat.

Meski tidak memiliki angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin sejak tahun 2020. Persentase penduduk Kota Pekanbaru yang hidup dalam kemiskinan meningkat dari 30,4 ribu pada tahun 2020 menjadi 32,73 ribu pada tahun 2021. Selain itu, jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang hidup dalam kemiskinan meningkat

menjadi 35,96 ribu pada tahun 2022. Kemiskinan di Pekanbaru berpotensi menimbulkan masalah kesejahteraan sosial yang berkelanjutan di lingkungan tersebut. Terkait masalah mengemis, pemerintah telah mengambil sikap tegas. Pemerintah pusat dan daerah kini memberikan perhatian besar terhadap masalah ini. Karena mereka mengurangi kenyamanan dan estetika lingkungan perkotaan, para gelandangan dan pengemis dapat diibaratkan sebagai penyakit menular yang menyebar ke seluruh kota. Istilah "gelandangan" berasal dari frasa "gelandang" yang merujuk pada seseorang yang tidak pernah memiliki rumah tetap atau yang terus-menerus mengembara (Suparlan, 1993). Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban dari pedesaan yang datang ke kota untuk mencoba peruntungan. Namun mereka tidak mempunyai cukup uang, keahlian khusus, atau pendidikan. Akibatnya, mereka melakukan pekerjaan serabutan, seringkali di sektor yang tidak terorganisir, termasuk pengemis, pengamen, dan pemulung.

Berdasarkan informasi yang penulis terima dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru, jumlah pengemis dan tunawisma meningkat antara tahun 2018 dan 2022. Pada tahun 2018, terdapat 65 orang tunawisma dan 35 orang pengemis, sehingga totalnya menjadi 100 orang. Pada tahun 2019, hanya 91 orang tunawisma dan 69 orang pengemis data ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Jumlah gelandangan dan pengemis meningkat menjadi 138 orang pada tahun 2020, dengan 127 orang pengemis dan 11 orang tunawisma. Hingga pada tahun 2021 data pengemis meningkat signifikan dan

mencapai 191 orang dengan 97 orang tunawisma dan 94 orang pengemis. Data ini akan terus bertambah hingga tahun 2024.

Selain kurangnya lapangan kerja, tingginya jumlah tunawisma dan pengemis di kota-kota besar juga disebabkan oleh rendahnya keterampilan dan motivasi bekerja. Sebenarnya, kita menjumpai banyak tunawisma yang masih bisa bekerja yakni melakukan apa saja yang bisa memberi mereka makanan.

Osa Karina (2022) menjelaskan bahwa fenomena sosial yang merasuki dinamika perkembangan wilayah perkotaan dan pedesaan adalah mengemis. Meskipun pengemis berinteraksi dengan masyarakat secara fisik, ketidakmampuan mereka untuk memanfaatkan fasilitas yang ada justru mengisolasi mereka. Seseorang yang tidak memiliki sumber pendapatan yang dapat diandalkan dan biasanya bergantung pada kemurahan hati orang lain dianggap sebagai pengemis. Saat ini, mengemis telah menjadi hal yang lumrah, dengan banyak orang yang masih sehat memilih untuk mengemis atau meminta sedekah. Karena keadaan ini, mengemis dipandang sebagai perilaku yang menimbulkan masalah dan menyimpang dari norma dan nilai sosial yang berlaku.

Selain menimbulkan kesulitan ekonomi, keberadaan pengemis juga menimbulkan kekhawatiran masyarakat tentang keadilan, moralitas, dan kesejahteraan publik. Banyak pihak mencoba memahami situasi ini dari sudut pandang masyarakat, yang seringkali tampak acuh tak acuh terhadap nasib

mereka, dan dari kebijakan pemerintah yang bertujuan mengatasi masalah pengemis melalui berbagai program.

Berdasarkan realitas yang ada saat ini, khususnya di Kota Pekanbaru, seseorang yang memilih mengemis bisa jadi benar-benar miskin dan/atau melarat, atau sekadar penyamaran atas situasi mereka yang sebenarnya, di mana mereka secara sukarela mengikuti gaya hidup pengemis karena hidup mereka sendiri jauh lebih baik daripada melarat? Hal ini seringkali mengungkap kehidupan beberapa pengemis yang hidup jauh di bawah garis kemiskinan. Meskipun mereka terus-menerus mengemis, ternyata beberapa dari mereka memiliki rumah, mobil, dan fasilitas hidup lainnya. Hal ini terjadi di Kota Pekanbaru, khususnya di Kelurahan Panam, serta di Jl. Arengka, Jl. Arifin Ahmad, dan beberapa tempat lainnya. Berdasarkan fenomena ini, penulis berupaya memahami perilaku mengemis masyarakat Pekanbaru. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang kehidupan para pengemis di Kota Pekanbaru dan alasan di balik keputusan mereka untuk hidup sebagai pengemis atau paksaan yang mereka alami.

Pengendalian tunawisma dan pengemis di Kota Pekanbaru melibatkan sejumlah masalah. Masalah pertama, yang berkontribusi terhadap peningkatan kemiskinan tahunan di Kota Pekanbaru adalah minimnya alternatif pekerjaan. Seiring meningkatnya angka kemiskinan, semakin banyak orang beralih ke strategi yang tidak konvensional seperti mengemis atau meminta-minta di tempat umum. Untuk meningkatkan keterampilan mereka, pemerintah daerah

telah berupaya memberikan pelatihan dan konseling kepada individu yang tertangkap dalam penggerebekan. Namun, setelah bebas, mereka kembali mengemis di jalanan. Banyaknya orang yang secara rutin mengalami kekerasan dan pelecehan akibat ketimpangan ekonomi yang mereka hadapi merupakan faktor kedua. Masyarakat terkadang memperlakukan tunawisma dan pengemis secara tidak manusiawi, yang secara terang-terangan melanggar hak asasi mereka. Masalah ketiga adalah maraknya gelandangan dan pengemis, yang banyak di antaranya bermukim di depan pertokoan di kawasan metropolitan, sehingga sangat mengganggu kenyamanan dan keindahan lingkungan perkotaan. Hal ini dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dan merusak lingkungan perkotaan.

Menurut Lewis (dikutip dari Osa Karina, 2022), budaya kemiskinan disebabkan oleh sejumlah variabel internal dan eksternal. Kemalasan, mudah menyerah, kepasrahan, dan kurangnya etos kerja merupakan contoh faktor internal yang berkontribusi terhadap kemiskinan, misalnya kemiskinan yang diakibatkan oleh cita-cita atau budaya yang dianut masyarakat miskin. Ketika struktur masyarakat dan pemerintahan tidak mampu mendukung dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat miskin, kemiskinan pun terjadi. Hal ini dikenal sebagai kemiskinan struktural dan disebabkan oleh kekuatan eksternal, alih-alih budaya kemalasan. Dengan keterbatasan dan timbulnya budaya malas menyebabkan beberapa masyarakat lebih tertarik untuk menjadi seorang peminta-minta atau pengemis.

Mengemis adalah tindakan meminta bantuan, amal, atau uang dari orang atau organisasi. Pakaian lusuh sering dikaitkan dengan mengemis sebagai cara untuk menyampaikan kebutuhan seseorang. Kemudahan dan kecepatan mendapatkan hasil yang diinginkan merupakan salah satu faktor yang memotivasi orang untuk mengemis. Hasil tersebut dapat diperoleh secara instan hanya dengan menghubungi masyarakat untuk meminta bantuan atau sumbangan.

Seseorang dapat dengan mudah mempelajari berbagai teknik dan rahasia mengemis hanya dengan mempraktekannya tanpa menerima pelatihan di tempat kerja. Misalnya, kapan harus berbicara, kapan harus menawarkan bantuan, bagaimana menyampaikan kesedihan, bagaimana menggunakan tipu daya untuk mendapatkan simpati dari orang lain melalui kelicikan mereka, dan sebagainya. Peristiwa ini tergolong fenomenologi terlepas dari moralitas tindakan mereka.

Menurut Husserl (dikutip dalam Moleong, 2015), pengalaman subjektif dan penyelidikan mendasar atas kesadaran merupakan definisi fenomenologi. Fenomenologi dalam konteks ini mengacu pada pengalaman subjektif dari berbagai jenis subjek yang ditemui. Secara umum diterima bahwa fenomenologi adalah studi tentang bagaimana orang menafsirkan pengalaman mereka.

Fenomenologi mempelajari ciri-ciri intrinsik sebagaimana fenomena-fenomena itu sendiri menyingkapkan diri kepada kesadaran. Setiap orang harus

bertolak dari subjek serta kesadarannya dan berupaya untuk kembali kepada kesadaran murni. Untuk mencapai bidang kesadaran murni, setiap orang harus membebaskan diri dari pengalaman serta kehidupan sehari-hari. Jika hal yang demikian telah dikerjakan, maka akan tersisa gambaran-gambaran yang hakiki (Dwi Siswanto, 1997).

Husserl (dikutip dari Crotty, 1996) ia mengembangkan fenomenologinya menjadi fenomenologi murni, yang objek fenomenologinya adalah fenomena murni. Menurut Husserl, fenomena murni adalah fenomena yang bebas dari rasionalisasi. Fenomena murni adalah data asli yang dapat ditangkap oleh kesadaran manusia. Menurut Husserl, apa pun yang dapat ditangkap oleh kesadaran manusia berhak diterima sebagai fenomena dan layak untuk diakui. Dengan kata lain, fenomena murni mencakup segala sesuatu yang dialami manusia, baik fisik maupun non-fisik. Husserl (dikutip dalam Carpenter, 1999; Crotty, 1996; Spiegelberg, 1978) merasa bahwa hanya kesadaran murni yang mampu mengamati fenomena murni. Hanya kesadaran murni, yang bebas dari praduga, keyakinan, dan informasi yang berasal dari kontak dengan dunia luar, yang mampu memahami segala sesuatu sebagaimana adanya. Reduksi fenomenologi adalah proses mempertahankan atau memisahkan praduga, keyakinan, dan informasi umum yang dapat memengaruhi bagaimana suatu fenomena dipahami dan diinterpretasikan.

Husserl (dikutip dalam Asih, 2005) menyatakan bahwa setiap fenomena selalu terdiri dari aktivitas subjektif dan suatu objek sebagai fokusnya. Aktivitas

subjektif selalu mengarah pada objek. Aktivitas subjektif menafsirkan, mengidentifikasi, dan membentuk makna objek. Oleh karena itu, aktivitas subjektif dan objek sebagai fokusnya tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, untuk memahami suatu objek, seseorang harus kembali kepada subjeknya. Oleh karena itu, fenomena hanya dapat diamati melalui orang yang mengalaminya.

Husserl (dikutip dalam Muslim, 2013) fenomenologi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan apa yang muncul dalam kesadaran kita ketika kita membiarkannya terwujud dalam keadaan alaminya tanpa menerapkan kategori mental kita padanya, atau, menggunakan frasa Husserl, "kembali ke realitas itu sendiri."

Karena ia membiarkan apa yang menampakkan dirinya dapat dilihat melalui dan dari dirinya sendiri atau nampak dalam kesadaran individu dalam menangkap fenomena sebagaimana adanya, seperti fenomena mengemis, maka jelas dari uraian di atas bahwa fenomenologi bertujuan untuk menangkap fenomena sebagaimana adanya (menampakkan diri) atau menurut penampakannya sendiri.

Saat ini, mengemis atau meminta-minta dilakukan oleh pria, wanita, waria, dan balita (anak di bawah lima tahun) serta orang tua lanjut usia. Mereka menggunakan berbagai teknik, seperti mengamen, bersiul, bertepuk tangan, memukul barang, memukul rebana, dan memainkan alat musik seperti gitar dan seruling. Ada yang berteriak, mengemis, dan bahkan menggunakan kekerasan; ada yang membawa map sumbangan; ada yang menggendong bayi; ada yang

menggendong anak kecil; ada yang bernyanyi; ada yang bernyanyi berkelompok; yang lainnya bernyanyi sendirian. Dari pakaian yang tidak pas hingga individu berpakaian rapi dengan dasi dan jaket. Membaca shalawat dan nasyid, atau bahkan Al-Qur'an, adalah cara sebagian orang menyampaikan permohonan mereka. Mereka memohon dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an.

Kelompok pengemis terdiri dari orang-orang dengan gaya hidup yang berbeda-beda, namun kemampuan mereka untuk memperoleh bantuan atau sumbangan yang berbeda-bedalah yang menjadikan mereka unik. Ada yang tidak menentu, ada yang ragu-ragu, dan ada pula yang tidak mampu atau tidak mau mengutarakan keinginannya. Kebanyakan dari mereka justru adalah orang-orang yang masih mempunyai harga diri dan mau menghargainya. Mereka tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang halus dan inklusif.

Kedua, sekelompok penipu licik yang menyamar sebagai pengemis. Kelompok ini memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk memilih celah strategis dan mendistorsi pandangan publik selain mengetahui seluk-beluk mengemis. Selain itu, mereka memiliki berbagai perilaku mengemis yang dinamis, seperti cara untuk memenangkan rasa kasihan dan simpati dari individu lain yang menjadi sasaran.

Mereka mengemis dengan berbagai cara, dan mereka sangat ahli dalam penipuannya sehingga mereka dapat menipu orang lain agar menjadi sasaran mereka. Mereka termasuk mereka yang mengemis di jalan-jalan yang ramai, di

tengah Kota di alun-alun, di lampu merah, di tempat-tempat berkumpul, pusat perbelanjaan, masjid, dan lokasi lainnya. Untuk mendapatkan simpati dan simpati dari orang lain, beberapa dari mereka juga berpura-pura sebagai orang buta atau cacat fisik atau membawa serta anak-anak kecil dan orang-orang cacat. Ada yang mengemis dengan cara mengamen, ada pula yang melakukannya sambil berpakaian rapi, termasuk mengenakan jas, dasi, dan membawa tas, dan lain sebagainya. Mungkin saja pengemis palsu ini punya uang lebih banyak daripada para donatur. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak di antara mereka yang memiliki peralatan listrik mewah di rumah mereka (Jawas, 2009, 2011, 2013, 2018).

Kehidupan masyarakat urban yang tidak dibekali dengan kualitas sumber daya manusia yang baik berisiko untuk termarginalkan. Tingkat pendidikan yang rendah seringkali menjadi hambatan utama dalam memperoleh pekerjaan yang layak, karena kesulitan dalam mencari peluang kerja yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hal ini diperburuk oleh rendahnya keterampilan yang dimiliki oleh sebagian besar individu, yang membuat mereka kesulitan untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif. Persaingan yang ketat dalam mencari peluang pekerjaan, baik secara individu maupun kelompok, pada akhirnya mengarah pada kemiskinan (Yanti, *Et all.*, 2023). Di Kota-Kota besar, standar upah yang tinggi umumnya hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki keterampilan khusus, sementara individu atau kelompok yang tidak memiliki keterampilan

yang memadai sering kali terpinggirkan. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar, yang pada gilirannya memperburuk kondisi kemiskinan.

Dalam konteks urbanisasi, ada dua faktor utama yang mendorong munculnya masalah sosial ini. Pertama, faktor pendorong dari daerah pedesaan, di mana kemiskinan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang pesat mengakibatkan ketimpangan antara jumlah penduduk dan luas lahan yang dapat digunakan untuk pertanian. Kedua, faktor penarik Kota, yang mencakup daya tarik ekonomi berupa peluang kerja, fasilitas pendidikan, pengembangan bakat, dan kesempatan untuk beradaptasi dengan kehidupan Kota yang lebih dinamis (Sasmita, Et al.,2023). Faktor penarik Kota adalah meliputi daya tarik ekonomi Kota berupa kesempatan kerja, fasilitas-fasilitas pendidikan, pengembangan bakat, rekreasi serta kesempatan besar untuk beremansipasi karena longgarnya kontrol masyarakat dan adat istiadat atas individu (Alwi, 1992). Urbanisasi ini seringkali memicu permasalahan sosial baru, termasuk kemiskinan struktural, yang diartikan sebagai kemiskinan yang diderita oleh kelompok masyarakat karena struktur sosial yang tidak memadai dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Rahman et al., 2023). Kemiskinan ini tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga menyebabkan terjadinya fenomena penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), yang sering kali muncul di daerah Perkotaan sebagai akibat dari kegagalan individu atau kelompok dalam

beradaptasi dengan dinamika kehidupan Kota besar (Tampubolon & Kurniasih, 2022).

Memasuki tahun 2020 dunia dilanda krisis disebabkan oleh covid-19 secara total berimplikasi kepada semua sisi kehidupan. Sisi ekonomi yang berimbas kepada kesehatan menyebabkan banyak kegiatan ekonomi yang dihentikan pemutusan hubungan kerja, sektor jasa, pasar terhenti dan menjadikan kegiatan ekonomi stagnan. Sektor ekonomi, jasa serta bisnis perdagangan lainnya boleh dikatakan mati suri. Pandemi covid-19, penurunan harga komoditas dan volatilitas pasar keuangan diprediksi akan berdampak negatif pada ekonomi global dan indonesia tahun ini, menurut *Asian Development Outlook (ADO) 2020*. Hal ini terutama berlaku mengingat beberapa mitra dagang utama indonesia diantisipasi akan mengalami dampak negatif pada ekonomi mereka. Diperkirakan bahwa permintaan domestik akan memburuk karena suasana hati konsumen dan bisnis memburuk. Namun, dengan bantuan reformasi investasi baru-baru ini, pertumbuhan indonesia diantisipasi akan meningkat pesat karena ekonomi dunia pulih pada tahun berikutnya.

Krisis ekonomi yang disebabkan oleh sebaran covid-19 membuat dunia mengalami kekacauan. Negara-negara dunia ketiga yang dianggap masih tertinggal menyebabkan pengangguran semakin meningkat hal ini disebabkan banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karena terpuruknya dunia industri, jasa dan perdagangan serta sektor pariwisata. Di samping industri kecil

dan menengah yang mulai ditutup warga Kota mulai dengan hidup untuk bertahan. Pekerjaan apapun mulai digeluti termasuk kreativitas kuliner serta membuka perdagangan kaki lima. Alternatif sebagai aksi nyata yang dianggap lebih mudah adalah masuk ke sektor ekonomi tertier.

Sejak krisis ekonomi berlangsung keadaan seperti yang diungkapkan di atas semakin mengemuka, persoalan menyebarkan keterampilan bagi rekan-rekan yang baru datang semakin intensif. Ikatan-ikatan daerah asal yang mulai diformalkan keberadaannya di kota-kota menjadikan sebuah paguyuban yang ampuh untuk menampung para rekan yang memerlukan bantuan.

Selain dari pada hal di atas, pemerintah aktif memberikan bantuan langsung tunai terutama kepada mereka yang terkena langsung akibat covid-19. Ekonomi berhenti pada lapisan bawah dirasakan terutama bagi pedagang dan atau pelaku ekonomi di tingkat tapak. Bantuan tunai seperti ini tidak saja dalam bentuk uang tunai dari pemerintah, juga dilakukan oleh berbagai pihak swasta, koperasi, paguyuban serta asosiasi lain yang memberikan dalam bentuk bahan keperluan pokok atau yang selalu disebut dengan sembako.

Pelaku ekonomi pada level tapak ketika tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi di kaki lima, warung-warung kecil dan terbuka, pasar kampung (bersifat musiman seperti pasar kaget) berusaha mencari nafkah untuk bertahan hidup. Mobilitas semakin terbatas karena pelaksanaan protokol kesehatan. Suasana ini sangat dirasakan di daerah Perkotaan dan dimana-mana terlihat sepi. Namun suasana ini berbeda pada kawasan pinggiran atau hinterland

karena masih terlihat proses ekonomi masih berlangsung. Aktivitas terbatas, ada hanya boleh sampai pukul lima sore dan paling lama dibolehkan hanya sampai pada pukul tujuh malam. Meskipun demikian manusia-manusia kota (urbanit) di level bawah aktivitas ekonomi kaki lima tetap masih terlihat. Urbanit lapisan bawah bergelut dengan waktu mengais serta mencari sesuatu untuk dapat ditukar dengan keperluan hidup. Kegiatan seperti inilah yang membuat kaum lapisan bawah Perkotaan mampu bertahan hidup (Jalil, 2021). Pada gambar 1.1 dapat dilihat penurunan grafik kemiskinan yang terjadi di Provinsi Riau.



Gambar 1.1 Grafik Kemiskinan Di Provinsi Riau

Sumber: bps indonesia

Berdasarkan informasi pada gambar 1.1, angka kemiskinan indonesia pada september 2024, sebanyak 8,57 persen penduduk hidup dalam

kemiskinan, yang merupakan penurunan sebesar 0,46 poin persentase dari maret 2024 dan 0,79 poin persentase dari maret 2023. Pada september 2024, terdapat 24,06 juta orang yang hidup dalam kemiskinan, yang merupakan penurunan sebesar 1,16 juta dari maret 2024 dan 1,84 juta dari maret 2023. Pada september 2024, 6,66 persen penduduk Perkotaan hidup dalam kemiskinan, menurun dari 7,09 persen pada maret 2024. Sebaliknya, proporsi penduduk miskin pedesaan menurun dari 11,79 persen pada maret 2024 menjadi 11,34 persen pada september 2024.

Jumlah penduduk miskin di Perkotaan pada september 2024 berkurang 0,59 juta jiwa dibandingkan maret 2024 (dari 11,64 juta jiwa pada maret 2024 menjadi 11,05 juta jiwa pada september 2024). Sebaliknya, jumlah penduduk miskin di pedesaan justru berkurang 0,57 juta jiwa pada periode tersebut, dari 13,58 juta jiwa pada maret 2024 menjadi 13,01 juta jiwa pada september 2024. Garis kemiskinan september 2024 adalah Rp595.242,00 per kapita per bulan, yang terdiri dari garis kemiskinan makanan sebesar Rp443.433,00 (74,50 persen) dan garis kemiskinan nonmakanan sebesar Rp151.809,00 (25,50 persen). Pada september 2024, rata-rata rumah tangga miskin di indonesia berjumlah 4,71 orang. Hasilnya, garis kemiskinan rata-rata adalah Rp 2.803.590,00 per rumah tangga miskin per bulan.

Salah satu contoh permasalahan terbesar yang dihadapi indonesia adalah kemiskinan, yang juga menjadi masalah sosial global. Kemiskinan adalah isu yang dihadapi banyak negara di dunia ini. Hal ini memicu munculnya

PMKS yang menurut Agus (2012) sering kali menjadi akibat dari ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup. Fenomena ini, seiring dengan pesatnya pertumbuhan Kota dan tingginya laju urbanisasi, semakin memperburuk ketimpangan sosial. Faktor penyebab kemiskinan di Perkotaan, seperti rendahnya keterampilan, pendidikan yang terbatas, dan kurangnya motivasi untuk berkembang, memperburuk situasi ini. Berdasarkan teori kemiskinan yang dikemukakan oleh (Bradshaw, 2007) ada lima konsep diantaranya adalah: 1) kekurangan individu: kemiskinan disebabkan oleh kekurangan dalam diri individu, seperti kurangnya keterampilan, pendidikan, atau motivasi; 2) sistem kepercayaan budaya: kemiskinan berasal dari sistem kepercayaan budaya yang mendukung subkultur kemiskinan, yang mempengaruhi perilaku dan nilai-nilai masyarakat miskin; 3) distorsi politik dan ekonomi: kemiskinan disebabkan oleh ketidakadilan dalam struktur politik dan ekonomi yang menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi; 4) ketimpangan geografis: kemiskinan timbul akibat ketimpangan geografis, di mana beberapa daerah memiliki sumber daya yang lebih sedikit, sehingga penduduknya terjebak dalam kemiskinan; 5) asal-usul kumulatif dan situasional: kemiskinan merupakan hasil dari peristiwa kumulatif dan keadaan tertentu yang saling berhubungan, seperti ketidakmampuan mengakses peluang pendidikan atau pekerjaan (Bradshaw, 2007).

Budaya kemiskinan yang digambarkan oleh Oscar Lewis merupakan budaya kemiskinan, bukan soal mereka miskin atau kaya, tapi budaya yang

melekat pada diri mereka karena merasa tidak berharga , artinya factor ekonomi hanya jadi pemicu awal tetapi kemudian jadi kebiasaan. Budaya ini menawarkan cara untuk mengatasi pikiran-pikiran yang menyedihkan dan suram yang merupakan ekspresi dari kesadaran bahwa kesuksesan dalam hidup tidak dapat dicapai sesuai dengan cita-cita dan tujuan masyarakat yang lebih luas. Banyak ciri budaya kemiskinan sebenarnya dapat dilihat sebagai upaya lokal untuk mengatasi masalah yang tidak dapat dipecahkan karena ketidakmampuan, ketidakpedulian, atau kecurigaan terhadap lembaga dan institusi yang ada saat ini, atau karena lembaga dan institusi tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan tertentu. Misalnya, mereka yang tidak dapat memperoleh kredit bank terpaksa mengorganisasi bantuan keuangan informal tanpa bunga di antara mereka sendiri untuk mencari sumber lain.

Namun, budaya kemiskinan lebih dari sekadar respons terhadap serangkaian realitas sosial yang sebenarnya. Melalui pengaruhnya terhadap anak-anak, budaya ini cenderung menyebar dari satu generasi ke generasi berikutnya setelah terbentuk. Anak-anak di daerah kumuh biasanya telah menginternalisasi keyakinan dan nilai-nilai mendasar dari subkultur mereka saat mereka berusia enam atau tujuh tahun, sehingga secara psikologis mereka tidak mampu memanfaatkan peluang dan perubahan keadaan yang mungkin dihadirkan oleh kehidupan.

Banyak perspektif yang dapat digunakan untuk mempelajari budaya kemiskinan, termasuk cara subkultur berinteraksi dengan masyarakat luas,

UNIVERSITAS ANDALAS

karakteristik masyarakat kumuh, sifat budaya keluarga, serta sikap, nilai, dan sifat karakter individu. Pertama, aspek utama dari budaya kemiskinan adalah integrasi dan partisipasi yang tidak efektif dari kaum miskin dalam lembaga-lembaga utama masyarakat. Banyak elemen yang berkontribusi terhadap masalah yang kompleks ini, seperti kurangnya sumber daya keuangan, prasangka dan segregasi, ketakutan, kecurigaan, atau apatis, serta penciptaan solusi yang berlaku secara universal. Namun, partisipasi dalam militer, organisasi kemanusiaan, dan penjara, di antara lembaga-lembaga masyarakat yang lebih besar, tidak selalu menghapuskan ciri-ciri budaya kemiskinan. Dalam hal sistem bantuan, yang dalam kenyataannya bantuan tersebut berfungsi membuat orang-orang itu asal dapat hidup saja, baik kemiskinan mereka yang mendasar maupun keputusan yang mereka punyai agaknya bahkan menjadi lebih langgeng daripada terhapus. Gaji rendah, kekurangan barang berharga, kurangnya tabungan, kekurangan makanan di rumah, dan kekurangan uang tunai semuanya disebabkan oleh upah rendah, pengangguran tinggi, dan setengah menganggur. Semua faktor ini membuat mustahil untuk terlibat dalam sistem ekonomi yang lebih besar secara efektif. Akibatnya, kita melihat dalam budaya kemiskinan tingginya angka gadai harta pribadi, hutang kepada rentenir lokal dengan suku bunga selangit, munculnya fasilitas kredit tidak resmi yang diatur secara serampangan di seluruh lingkungan, penggunaan furnitur dan pakaian bekas, dan pola harian sering membeli sejumlah kecil makanan dan makanan ringan berdasarkan tingkat kebutuhan.

UNTUK KEBERHAKAN BANGSA

Kedua, kita dapat mengamati kurangnya pengorganisasian di luar keluarga inti dan keluarga besar, serta rumah-rumah yang rusak, sempit, dan padat, sambil menganalisis dan mengkarakterisasi budaya kemiskinan di tingkat masyarakat setempat. Kadang-kadang timbul sebentar pengelompokan tidak resmi atau perkumpulan-perkumpulan yang secara spontan berdiri di wilayah slum. Adanya geng- setempat yang melampaui pemukiman wilayah slum mencerminkan proses perkembangan mencolok dari yang saya duga. Sebenarnya, sebab dalam masyarakat yang sangat canggih, terspesialisasi, dan terorganisasi dengan baik, rendahnya tingkat pengorganisasian itulah yang menyebabkan budaya kemiskinan memiliki ciri-ciri terbelakang. Kebanyakan masyarakat primitif telah mencapai suatu tahap organisasi sosial budaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat modern di wilayah slum di Perkotaan.

Warga di daerah kumuh dan lingkungan sekitar mungkin memiliki rasa kekeluargaan dan semangat kekeluargaan, meskipun kehidupan mereka biasanya tidak terlalu teratur. Intensitas rasa ini berbeda dari satu daerah kumuh ke daerah kumuh lainnya di dalam Kota metropolitan, serta dari satu wilayah atau negara ke negara lainnya. Penentu utama variasi ini adalah ukuran dan atribut fisik daerah kumuh, ukuran dan usia pemukiman, perselisihan tentang perumahan dan tanah (berbeda dengan hak atas tanah penghuni liar), sewa, etnis, ikatan kekeluargaan, dan kebebasan atau pembatasan pergerakan. Bila wilayah slum dipisahkan dari daerah-daerah sekitarnya dengan membuat

tembok-tembok tebal atau rintangan-rintangan fisik lainnya, atau bila sewa rumah adalah rendah dan tidak berubah-ubah dan bila semakin banyak tempat pemukiman yang permanen dan mantap (yang berusia 20 atau 30 tahun), masyarakat setempat terasa hampir seperti masyarakat desa jika orang-orangnya berasal dari kelompok etnis, ras, atau bahasa tertentu dan terhubung oleh ikatan kekeluargaan atau persaudaraan. Hal ini terutama berlaku jika ada beberapa asosiasi yang tidak diatur dari atas. Dalam banyak hal perpaduan dari kondisi-kondisi yang seperti tersebut di atas tidak pernah ada. Namun bila organisasi intern dan esprit de corps terbatas dan anggota masyarakat begitu leluasa berpindah maka suatu perasaan sekampung berkembang sehingga memisahkan secara jelas penghuni wilayah slum dari bagian Kota lainnya.

Ketiga, masa dewasa awal, kohabitasi atau pernikahan bersyarat, masa kanak-kanak yang pendek dan kurangnya perhatian orang tua, tingginya angka perpisahan ibu-anak, kecenderungan ke arah keluarga matrilineal dengan lebih banyak kerabat ibu, kecenderungan kuat ke arah otoritarianisme, kurangnya hak pribadi, dan penekanan pada bentuk-bentuk solidaritas yang hanya diungkapkan secara lisan tetapi jarang ditunjukkan dalam tindakan di antara kerabat karena persaingan antar saudara, persaingan untuk sumber daya yang terbatas, dan pengaruh kasih sayang ibu semata-mata merupakan karakteristik utama dari budaya kemiskinan di tingkat keluarga.

Keempat, pada tingkat individu, ciri-cirinya yang utama adalah kuatnya perasaan tak berharga, tak berdaya, ketergantungan, dan rendah diri.

Ciri-ciri ini dapat ditemukan pada keluarga-keluarga yang menghuni wilayah slum di Mexico City dan San Juan, yang dalam kehidupan sosial masyarakatnya, mereka itu tidak mengalami diskriminasi rasial. Dengan sendirinya kebudayaan kemiskinan dari orang negro di Amerika Serikat mempunyai tambahan dalam hal keterbelakangannya dengan adanya diskriminasi rasial, namun seperti yang telah saya kemukakan sebelumnya, faktor tambahan ini mengandung potensi besar untuk melancarkan protes dan mengorganisasi tindakan-tindakan revolusioner yang nampaknya tidak terdapat pada wilayah-wilayah slum di Mexico City ataupun di antara kaum miskin kulit putih di bagian selatan Amerika Serikat.

Tingkat kesusahan yang tinggi yang disebabkan oleh intensitas penderitaan ibu, kesombongan, kurangnya pengendalian diri dan dorongan nafsu, kebingungan tentang identitas gender, fokus yang kuat pada saat ini dan ketidaksabaran dalam menunda rencana dan keinginan masa depan, perasaan tidak berharga dan pasrah, keyakinan yang meluas pada superioritas laki-laki, dan prevalensi penyakit mental yang tinggi adalah beberapa ciri tambahan.

Individu yang hidup dalam kemiskinan tidak memiliki kesadaran akan masa lalu dan hanya berfokus pada peristiwa lokal dan provinsi. Mereka hanya mengetahui tantangan, keadaan lokal, komunitas, dan gaya hidup mereka. Mereka biasanya tidak memiliki informasi, sudut pandang, dan ideologi yang diperlukan untuk mengenali persamaan antara isu mereka dan isu rekan-rekan

mereka di seluruh dunia. Meskipun sangat peka terhadap kesenjangan status, mereka tidak memiliki kesadaran kelas (Suparlan, 1984).

Dimensi kemiskinan memiliki banyak segi dan, dalam prakteknya, juga mencakup faktor-faktor nonekonomi (sosial, budaya, dan politik). Pada dasarnya, dimensi-dimensi tersebut tidak hanya berfokus pada kesulitan ekonomi. Karakter kemiskinan yang memiliki banyak segi berarti bahwa kemiskinan mencakup kesejahteraan sosial dan material. Kebutuhan kesejahteraan dapat diukur, seperti halnya kemiskinan absolut, untuk menentukan seberapa banyak yang dibutuhkan seseorang. Akan tetapi, pengukuran tersebut menjadi subjektif dan sangat tidak tepat untuk menentukan jumlah kesejahteraan sosial yang harus dipenuhi oleh seseorang. Bagian ini mempertanyakan dimensi kemiskinan, bukan besarnya kemiskinan.

Yang pertama dan paling nyata adalah bahwa kemiskinan memiliki komponen material atau ekonomi. Meskipun harga akan selalu berfluktuasi setiap tahun berdasarkan laju inflasi rupiah, dimensi ini dapat diukur dalam rupiah. Kedua, ada aspek sosial dan budaya dalam kemiskinan. Penilaiannya sangat kualitatif karena metrik kuantitatif kurang berguna untuk memahami dimensi ini. Agar dapat bertahan hidup, mereka yang kurang beruntung secara ekonomi akan menciptakan ceruk budaya yang dikenal sebagai budaya kemiskinan. Pelembagaan nilai-nilai seperti ketidakpedulian, apolitisisme, fatalisme, ketidakberdayaan, dan sebagainya adalah contoh dari budaya kemiskinan ini. Oleh karena itu, serangan terhadap kemiskinan identik dengan

upaya untuk melemahkan budaya ini. Akan sulit untuk keluar dari kemiskinan ekonomi jika budaya ini tidak diberantas.

Ketiga, ada komponen struktural atau politik dalam kemiskinan, sehingga mereka yang miskin secara ekonomi juga miskin secara struktural dan politik. Kemiskinan muncul karena orang miskin berada di dasar hierarki sosial dan tidak memiliki sumber daya untuk berpartisipasi dalam politik atau memegang kekuasaan politik.

Intinya, aspek-aspek kemiskinan ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia melampaui pertimbangan finansial. Program yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain selain ekonomi. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan dasar harus didahulukan, tetapi harus ada penekanan pada penanggulangan kemiskinan non ekonomi setelah itu tercapai. Hal ini konsisten dengan perubahan kebijakan pembangunan negara, yang sekarang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia secara keseluruhan selain pertumbuhan ekonomi.

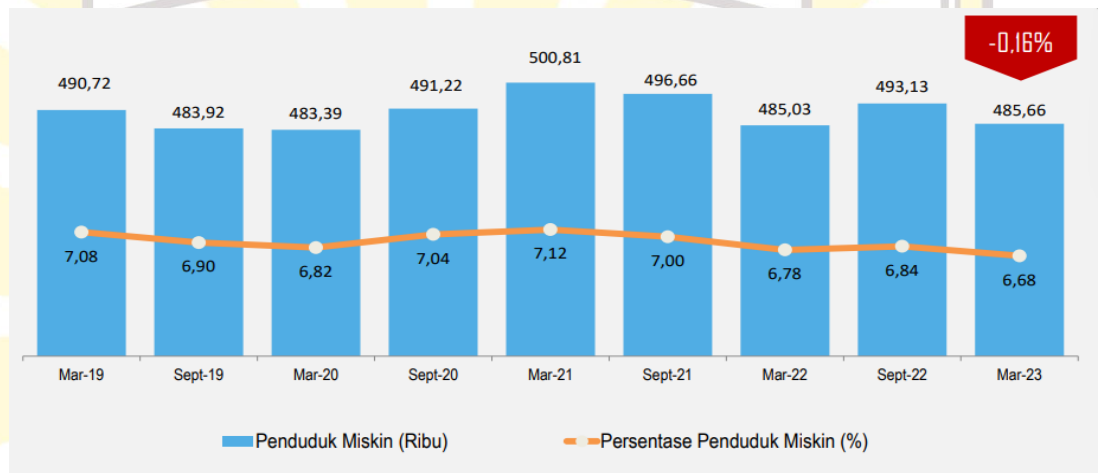
Dari uraian sebelumnya jelaslah bahwa kemiskinan merupakan fenomena sosial yang selain memiliki dimensi ekonomi, juga memiliki dimensi struktural, psikologis, kultural, dan lain-lain. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan juga harus bersifat multifaset. Strategi penanggulangan kemiskinan yang hanya mengandalkan "strategi kesejahteraan" dan "strategi amal" pada hakikatnya akan gagal. Perencana pembangunan harus memahami profil kemiskinan agar dapat memahami hakikat kemiskinan secara menyeluruh,

dengan mempertimbangkan semua aspeknya. Akuisisi dan distribusi sumber daya, layanan sosial, dan pendapatan seharusnya bukan satu-satunya strategi yang digunakan untuk mengurangi kemiskinan; "rasa harga diri" juga harus ditingkatkan, begitu pula peluang untuk mobilitas sosial dan peluang pengambilan keputusan. Karena itu, program yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan harus mempertimbangkan faktor-faktor lain selain ekonomi. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan dasar harus didahulukan, tetapi juga harus ada penekanan pada penanganan kemiskinan non ekonomi setelah itu tercapai. Hal ini konsisten dengan perubahan kebijakan pembangunan negara, yang sekarang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia secara keseluruhan selain pertumbuhan ekonomi.

Dari uraian sebelumnya jelaslah bahwa kemiskinan merupakan fenomena sosial yang selain memiliki dimensi ekonomi, juga memiliki dimensi struktural, psikologis, kultural, dan lain-lain. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan juga harus bersifat multifaset. Strategi penanggulangan kemiskinan yang hanya mengandalkan "strategi kesejahteraan" dan "strategi amal" pada hakikatnya akan gagal. Perencana pembangunan harus memahami profil kemiskinan agar dapat memahami hakikat kemiskinan secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan semua aspeknya. Perolehan dan penyaluran sumber daya, layanan sosial, dan pendapatan tidak boleh menjadi satu-satunya strategi yang digunakan untuk mengurangi kemiskinan; "harga diri" juga harus

ditingkatkan, demikian pula peluang untuk mobilitas sosial dan kesempatan pengambilan keputusan (Gunawan, 1999).

Pada gambar 1.2 dapat dilihat penurunan grafik kemiskinan yang terjadi di provinsi riau.



Gambar 1.2 grafik kemiskinan di provinsi riau tahun 2023

Sumber: bps provinsi riau

Berdasarkan data yang disajikan dalam gambar 1.2, jumlah penduduk miskin di provinsi riau pada maret 2023 tercatat sebesar 485,66 ribu orang, mengalami penurunan sebanyak 7,47 ribu orang dibandingkan dengan kondisi pada september 2022. Namun, jumlah ini mengalami sedikit kenaikan sebanyak 0,63 ribu orang jika dibandingkan dengan maret 2022. Persentase penduduk miskin pada maret 2023 mencapai 6,68 persen, mengalami penurunan sebesar 0,16 persen poin dibandingkan dengan september 2022, dan penurunan 0,10 persen poin dibandingkan dengan maret 2022. Meskipun terdapat penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun, masih ada sejumlah permasalahan yang

perlu mendapat perhatian lebih, khususnya dalam upaya memperbaiki tata letak Kota dan fungsi Kota secara keseluruhan. Salah satu isu yang cukup mencolok di Kota Pekanbaru adalah keberadaan gelandangan dan pengemis, yang sering kali terlihat di persimpangan jalan atau lampu merah. Fenomena ini menjadi salah satu tantangan yang memerlukan perhatian serius, mengingat dampaknya terhadap citra Kota dan kesejahteraan sosial masyarakat Perkotaan.

Orang-orang yang terjebak dalam kondisi terpinggirkan akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia seringkali berakhir sebagai pengemis. Orang-orang yang mengandalkan mengemis di tempat umum dengan berbagai teknik dalam upaya untuk menarik simpati orang lain dikenal sebagai pengemis (pp no. 31 tahun 1980).

Berdasarkan data jumlah gelandangan dan pengemis yang berhasil diringkus dalam razia dinas sosial dan satpol pp Kota Pekanbaru, selama kurun waktu 2009-2013, sebanyak 509 gelandangan dan pengemis berhasil diringkus. Sebanyak 238 gelandangan dan pengemis di antaranya telah dipulangkan ke daerah asal, 201 gelandangan dibawa warga, dan 90 gelandangan mendapatkan pembinaan keterampilan dari pemerintah Kota Pekanbaru. Selain memberikan pelatihan, data tersebut tidak menunjukkan adanya rehabilitasi sosial yang lebih menyeluruh. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menghambat terwujudnya tujuan Pekanbaru sebagai pusat budaya, perdagangan, jasa, dan pendidikan melayu guna menciptakan masyarakat yang sejahtera (Muslim, 2013).

Berdasarkan hasil observasi di Kota Pekanbaru, meskipun Kota ini terus berupaya memperbaiki diri menuju Kota madani, fenomena pengemis masih ditemukan di berbagai lokasi strategis. Para pengemis biasanya beroperasi pada jam-jam sibuk, di persimpangan lampu merah seperti di jalan soebrantas dengan garuda sakti panam, jalan soebrantas dengan jalan sm amin, jalan soekarno-hatta dengan jalan soebrantas, serta di beberapa pusat perbelanjaan seperti pasar Jl. Arengka dan pasar sukaramai. Bahkan pada hari libur, seperti di sekitar jalan sudirman, pengemis masih terlihat mengharapkan rezeki. Berbagai strategi pencegahan, termasuk penjangkauan, bimbingan sosial, pengembangan sosial, penyediaan bantuan sosial, dan peningkatan prospek kerja, telah digunakan untuk mengatasi masalah tunawisma dan pengemis di Kota Pekanbaru. Namun, meskipun telah ada program-program tersebut, jumlah pengemis belum menunjukkan penurunan yang signifikan setiap tahunnya. Oleh karena itu, untuk menyelidiki faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penyebaran pengemis di Kota Pekanbaru, khususnya di Provinsi Riau, diperlukan penelitian yang lebih mendalam.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan telah diuraikan, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai aktivitas pengemis di Kota Pekanbaru. Dengan demikian, penelitian ini akan berjudul **“Fenomena Kehidupan Pengemis di Kota Pekanbaru”** untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong kehidupan pengemis serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan ini.

B. Rumusan masalah

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong kehidupan pengemis di Kota Pekanbaru.
2. Untuk menganalisis pola perilaku pengemis di Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengidentifikasi apa saja alasan-alasan menjadi pengemis Kota bertuah
4. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan pengemis di Kota Pekanbaru.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, kegunaan yang diharapkan berkembangnya wawasan khasanah dan peka terhadap masalah yang berkembang di masyarakat.
2. Bagi mahasiswa, memberikan sumbangan keilmuan tentang pengemis yang berkembang dimasyarakat Kota Pekanbaru.
3. Bagi Akademisi, menjadi sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai fenomena sosial, khususnya terkait masalah

kemiskinan dan pengemis di Perkotaan.

4. Bagi masyarakat, memberikan informasi dan gambaran agar bagaimana masyarakat lebih memilih memberikan kepada pengemis yang sebenarnya.
5. Bagi pemerintah Kota Pekanbaru, penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani masalah pengemis, termasuk program rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi mereka.

